



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 180 /01 /HUKUM /2025

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

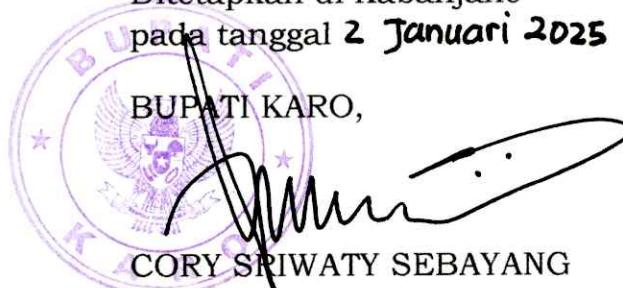
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 180/01 /HUKUM /2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
PERIHAL
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Materi Pokok	Status		Dasar Hukum Pelaksanaan
			Baru	Ubah	
1	2	3	4	5	
1	Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi (Pengusul: DPMPTSP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi b. Kriteria Pemberian Intensif Dan Kemudahan Investasi. c. Bentuk Pemberian Intensif Dan Kemudahan Investasi. d. Tata Cara Pemberian Intensif Dan Kemudahan Investasi. e. Jangka Waktu. f. Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi. g. Pemohon. h. Tim Verifikasi dan Penilaian i. Sanksi. 	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi.
2	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Pengusul: Satpol PP)	Aturan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	√		Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

3	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo (Pengusul: Satpol PP)	Aturan Petunjuk Teknis SOP dan Kode Etik Satpol PP Kab.Karo		√	Peraturan Menteri Dlam Negeri Republik Indonesia No 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4	Pengembangan Ekonomi Kreatif (Pengusul: Dibudporapar)	<p>Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian nasional dan global; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah melalui daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; c. Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; d. Membuka lapangan kerja, lapangan usaha dan iklim usaha kreatif yang kondusif, berpihak pada nilai seni dan budaya yang berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal; e. Mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; f. Melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; g. Mendotong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi kreatif; h. Mewujudkan Kabupaten Kreatif yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakan sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan 	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Repunlik Indoensia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 11)

5	Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Pengusul: Disbudporapar)	a. Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan b. Penghargaan Olahraga kepada Pembina Olahraga c. Penghargaan Olahraga kepada Tenaga Keolahragaan d. Penghargaan Olahraga kepada Organisasi Olaraga	√		Pasal 45 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga
6	Penyelenggaraan MICE di Kabupaten Karo (Pengusul: Dibudporapar)	Mengatur tentang Penyelenggaraan MICE DI Kabupaten Karo untuk mewujudkan destinasi pertemuan, perjalanan intensif, konvensi, dan pameran yang berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan, menambah kesempatan kerja dan masuknya investasi	√		Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
7	Standar Keamanan dan Keselamatan Usaha Pariwisata (Pengusul; Dibudporapar)	Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata	√		Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021
8	Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Pengusul: DKPP)	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Karo	√		1. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi 3. Peraturan Presiden No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
9	Tata Naskah Dinas (Pengusul: Bagian Organisasi)	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2023
10	Pakaian Dinas (Pengusul: Bagian Organisasi)	Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 10 Tahun 2024
11	Kelas Jabatan (Pengusul: Bagian Organisasi)	Pedoman Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo		√	Keputusan Menteri Pelayanan Aparatur Negara

					dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2024
12	Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pengusul: Disperindag)	Perubahan Terhadap Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Berdasarkan Hasil Peninjauan Perkembangan Perekonomian di Masyarakat.	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Perda Kab Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/ Prekusor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. (Pengusul: Bakesbang)	Tugas Wewenang Pemerintah, Pencegahan, Antisipasi Dini, Penganagan dan Rehabilitasi, Partisipasi Masyarakat, Tim Terpadu dan Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Pelaporan dan sanksi Administrasi baik teguran lisan maupun teguran tertulis.	√		Perda Kab. Karo No. 06 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika/Prekusor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
14	Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2025 (Pengusul: Bappedalitbang)	Penerapan Inovasi Instansi Pemerintah Daerah	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022
15	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Karo Tahun 2025-2029	√		Peraturan BRIN No. 05 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
16	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Sehubungan akan disusun RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil Pilkada Serentak, maka disusun Renstra PD	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

				Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 (Pengusul: Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan tahunan	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Karo Tahun 2025 (Pengusul: Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan tahunan	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 (Pengusul: Bappedalitbang)	Sehubungan Dengan Penyusunan RKPD Tahun 2026, akan disusun Renja Perangkat Daerah	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

					Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Bappedalitbang)	Untuk menetapkan indikator kinerja utama pada RPJMD kab. Karo tahun 2025-2029 dan Renstra perangakat Daerah tahun 2025-2029	√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 89 tahun 2021 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
21	Strategi Sanitasi Kabupaten Karo Tahun 2025 2029	Kebijakan dan Setrategi Pembangunan sanitasi secara komperhensif	√		Peraturan Presiden No. 186 tahun 2014 Tentang percepatan

	(Pengusul: Bappedalitbang)			penyediaan air minum dan sanitasi
22	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Kebijakan dan strategis mencapai TPB/SDGs Kab. Karo Tahun 2025-2029	√	PP RI No. 111 th. 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
23	Pusat Informasi Layak Anak (Pengusul: DP3AP2KB)	Penyelenggaraan sistem informasi elektronik dan non-elektronik yang bebas pelanggaran hak anak/ bahan berbahaya, seperti mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, rasialisme,ancaman,kevulgaran,kecabulan,radikalisme,atau ekspose data/diri anak.	√	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak.
24	Pusat Pembelajaran Keluarga (Pengusul: DP3AP2KB)	Pembentukan dan Penguatan Pelembagaan Puspaga, Memperkuat Kapasitas Puspaga Dalam Layana Pengkuatan Berbasis Hak Anak dan Mewujudkan Puspaga Menjadikan Lembaga Pelayanan Publik Untuk Pemenuhan Hak Anak	√	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. - Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. - Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
25	Lembaga Pengasuh Alternatif Tersandarisasi	Pelaksanaan Lembaga Pengasuhan Sesuai Standar Untuk Memberikan Mekanisme	√	- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

	(Pengusul: DP3AP2KB)	Pengasuhan Yang Terbaik Untuk Tumbuh Kembang Anak			Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. - Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
26	Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak (Pengusul: DP3AP2KB)	Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Manajemen Kasus Secara Umum, Mekanisme Pelaporan, Mekanisme Penanganan. Perlindungan Khusus Anak Adalah Bentuk Perlindungan Yang Di Berikan Kepada Anak Dalam Situasi Tertentuk Untuk Mendapatkan Jaminan Rasa Aman. Tujuannya Adalah Untuk Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Anak, Seperti hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Prinsip Prinsip dasar perlindungan anak, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Non diskriminasi• Kepentingan yang terbaik bagi anak• Hak untuk hidup, Kelangsungan hidup, dan perkembangan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Dan Lembaga Negara Lainnya Berkewajiban dan Bertanggung Jawab Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.	√		- Undang-undang no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
27	Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak (Pengusul: Distan)	Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Yang Mencakup pendelegasian wewenang kepada kepala dinas, tata cara pemeriksaan kesehatan hewan dan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Karo

		daging, tata cara pemotongan, pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penagihan penyetoran retribusi serta ketentuan pelaksanaannya			
28	Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Pengusul: Distan)	BPP Merupakan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pmerintah yang berada di kecamatan; merupakan unit kerja nonstruktural pada dinas pertanian yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian; melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP kepala dinas pertanian menetapkan seorang penyuluhan pertanian sebagai kordinator BPP.	√		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; - Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani; - Peraturan Presiden No 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi penyuluhan pertanian; dan - Peraturan Menteri Pertanian No 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
29	Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) (Pengusul: Distan)	STDB diperuntukkan bagi perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar	√		Permentan No 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang perubahan kedua atas pementan No 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan
30	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (Pengusul: Distan)	Rencana aksi daerah untuk mendukung kerberlanjutan pertanaman kelapa sawit di kabupaten karo	√		Instruksi Presiden No 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2014
31	Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul : BKPSDM)	Sistem Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS,

					Sebagaimana telah di ubah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
32	Petunjuk Pelaksanaan Mutasi PNS atas Permintaan Sendiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul : BKPSDM)	Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri nomor 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antar Kabupaten / Kota antar Provinsi dan antar Provinsi. 2. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Pelaksanaan Mutasi.
33	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul : BKPSDM)	Berdasarkan Tatacara dan Pembayaranya	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. PP tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Mentri dalam negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
34	Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Pengusul : BKDSDM)	Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dan Kebutuhan Kompetensi apartur yang mengurusi sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) serta management pengetahuan yang di peroleh	√		Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
35	Penyelenggaraan Perparkiran (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Jenis dan Lokal Parkir, Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum, Penyelenggaraan Parkir Khusus, Penyelenggaraan Parkir Insidentil, Pengelolaan Parkir. Juru Parkir , Tata cara Penyelenggaraan Parkir, Pemungutan Retribusi Parkir, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No.01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

36	Penguncian dan Pemindahan Kendaraan Bermotor (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Penguncian Ban, Penderetan atau Pemindahan, Penyimpanan Kendaraan Bermotor, Pelaporan, Penutup	√		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo No.01 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
37	Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Rencana Umum Jaringan Trayek, Ketentuan Penutup	√		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
38	Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Penyelenggara, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor, Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Non KBWU, Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor, Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup	√		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
39	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Andalalin, Prosedur Teknik Andalalin, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

40	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Kabupaten Karo (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas, Pendanaan, Ketentuan Penutup	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
41	Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan, Tata cara dan prosedur pemanfaatan aset, Jenis pemanfaatan aset daerah, Tarif pemanfaatan, Ketentuan Penutup	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
42	Perubahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pengusul: DPMD)	Penghapusan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 -		√	1. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 tentang penetapan berahirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia 2. UU No. 3 Th. 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 6 ahun 2014 tentang Desa
43	Pembentukan Dusun. (Pengusul: DPMD)	Tata Cara Pembentukan Dusun	√		Permendagri No. 1 Tahun 2017 Penataan Desa
44	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Dana Desa Tahun 2025 (Pengusul: DPMD)	a. Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2025 b. Fokus Penggunaan dana desa tahun 2025	√		Peraturan mentri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Th. 2023 tentang rincian Prioritas Penggunaan dana desa
45	Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2025 (Pengusul: DPMD)	Menetapkan Rincian ADD dan Rincian BBPDRD setiap desa di Kabupaten Karo	√		PP Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 tahun 2024 peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 Th. 2014 Tentang Desa
46	Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa (Pengusul: DPMD)	Pelaksanaan Transaksi Nontunai terhadap Penerimaan Desa Pengeluaran Desa dan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

		Pembayaran Desa di lingkungan Pemerintah Desa		
47	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Pengusul: DPMD)	Tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	PP Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 tahun 2024 peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 Th. 2014 Tentang Desa
48	Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa (Pengusul: DPMD)	Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa	√	Pasal 28 Permendagri No. 20ntahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
49	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Kearsipan (Pengusul: Dinas Perpustakaan dan Arsip)	Tata cara pengelolaan arsip dinamis dan tata cara alih media arsip, Tata cara penyusutan arsip, Pengolahan Arsip Vital, Pengolahan Arsip Statis, ketentuan mengenai autentisitas arsip statis, Standar, mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengawasan kearsipan, Tugas, fungsi dan tanggung jawab organisasi unit kearsipan, Kompetensi, pendidikan dan prlatihan arsiparis, standar minimal jumlah aseiparis dan penyediaan jamiman kesehatan dan tanggung jawab profesi, Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip milik daerah, kerja sama kearsipan, Sistem, mekanisme dan prosedur pemberian layanan jasa serta pertanggungjawaban pelaksanaan layanan jasa,	√	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahu 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2023
50	Kode Kelasifikasi, Jadwal Retensi dan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Pengusul: Dinas Perpustakaan dan Arsip)	Pengklasifikasian surat kedinasan, jadwal retensi arsip dan sistem keamanan dan akses arsip dinamis	√	1. Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negri dan Pemerintahan Derah 2. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

					3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tenteng Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Kearsipan
51	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 (Pengusul: BKAD)	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
52	Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Pengusul: BKAD)	Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
53	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Pengusul: BKAD)	Perubahan atas rincian pada peraturan bupati tentang penjabaran APBD Tahun anggaran 2025		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
54	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Pengusul: BKAD)	Tata cara pemberian dan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	√		Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
55	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Pengusul: BKAD)	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2025	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

56	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengusul: BKAD)	Perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
57	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo (Pengusul: BKAD)	Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	√		BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
58	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026 (Pengusul: BKAD)	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
59	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026 (Pengusul: BKAD)	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
60	Analisis Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026 (Pengusul: BKAD)	Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

61	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026 (Pengusul: BKAD)	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
62	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan BMD (Pengusul: BKAD)	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan BMD		√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
63	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 (Pengusul: BKAD)	Pertanggungjawaban APBD	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
64	Kebijakan Akuntansi (Pengusul: BKAD)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
65	Kawasan Tanpa Rokok (Pengusul: Dinkes)	Kawasan Tanpa Rokok	√		Perda Kab Karo Nomor 06 Tahun 2024
66	Pencegahan dan Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus/Aquired Immunodeficiency Syndrome</i> (Pengusul: Dinkes)	Pencegahan dan Penagulangan HIV/AIDS	√		Perda Nomor 08 Tahun 2024
67	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo (Pengusul: BPBD)	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo	√		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

						<p>Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran Serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana
68	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karo (Pengusul: BPBD)	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karo		√		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

					<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran Serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana
69	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) di Kabupaten Karo (Pengusul: BPBD)	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Atas Suatu Bencana Yang Terjadi Berdarkan Keputusan Bupati dan Analisa Pemenuhan Kebutuhan Tersebut	✓		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana

					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana; - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
70	Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Pengusul: BPBD)	Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana			- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran Serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

					<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana
71	Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pratama, dan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri di Kab. Karo Tahun Angaran 2025 (Pengusul: Dinas Pendidikan)	Petunjuk Teknis Peraturan Bupati Karo tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium jasa pendukung Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Honorer Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pratama, dan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Di Kab. Karo Tahun Angaran 2025	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

72	Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)	1. Layanan SPBE 2. Proses bisnis 3. Data dan Informasi 4. Aplikasi SPBE 5. Infrastruktur SPBE 6. Keamanan SPBE	√	-	1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
73	Pusat Data di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)	Pengelolaan Pusat Data dan Pengendalian	√	-	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
74	Pemanfaatan Jaringan Intra di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)	Pedoman Pemanfaatan Jaringan Intra	√	-	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

					2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
75	Sistem Penghubung Layanan di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)	1. Pengelolaan data pengembangan system penghubung layanan 2. Prosedur Sistem Penghubung Layanan 3. Pembinaan dan Pengawasan 4. Monitoring dan Evaluasi	√	-	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
76	Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah	Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah	√		1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

	(Pengusul: Bapenda)				2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024
77	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Pengusul: Bapenda)	Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	✓		1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024
78	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pengusul: Bapenda)	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024
79	Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pengusul: Bapenda	Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024

